

**LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
PERCEPATAN LAYANAN PRIORITAS PERTANAHAN
PENGECEKAN SERTIPIKAT MELALUI DIGITALISASI
BUKU TANAH DAN SURAT UKUR PADA KANTOR
PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR**

Nama : Ismail, S.E.
NIP : 198803092009121004
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS PUSAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2023**



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Implementasi Aksi Perubahan dengan judul:

“Percepatan Layanan Prioritas Pengecekan Sertipikat melalui Digitalisasi Buku Tanah dan Surat Ukur”

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 Gelombang 1 Angkatan II,

Nama : Ismail, S.E.
NIP : 198803092009121004
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Implementasi Aksi Perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023.

Menyetujui:

Bogor, 7 Agustus 2023
COACH



Akhmad Misbakhul Munir, S.T., M.Sc
NIP. 198603242009121004

Pematang Siantar, 07 Agustus
2023



MENTOR
Imansyah Lubis, S.H.
NIP. 196710181993031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Swt. senantiasa penulis panjatkan selama masa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II sampai saat ini telah dapat menyelesaikan proposal Laporan Implementasi Aksi Perubahan dan tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani, namun penulis tetap berusaha menyerap segala materi dan ilmu yang di transformasikan kepada peserta sehingga mampu meningkatkan kemampuan peserta untuk menjadi seorang Pemimpin yang melayani serta mampu membangun ide inovasi dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat dalam lingkup kerja penulis.

Terimakasih penulis haturkan kepada segenap jajaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah mendukung serta membantu peserta selama proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar yang telah mendukung, membimbing dan memotivasi penulis selama masa pelatihan, tidak lupa penulis sampaikan terimakasih terhadap Kerjasama dan persaudaraan yang terbentuk dari sahabat-sahabat peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II. Penulis juga berharap semoga proyek aksi perubahan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Negara segenap jajaran Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pematang Siantar, 05 Agustus 2023



Ismail, S.E

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Aksi Perubahan.....	2
1.3 Manfaat Aksi Perubahan.....	2
1.4 Ruang Lingkup Aksi Perubahan.....	4
1.5 Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah.....	4
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN.....	11
2.1 Pembangunan Integritas.....	11
2.2 Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI).....	12
2.3 Pengelolaan Tim.....	13
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN.....	15
3.1 Capaian dan Bukti Kualitas Pelayanan Publik.....	15
3.2 Manfaat Aksi Perubahan.....	16
3.3 Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan.....	18
3.4 Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan	20
BAB IV DESIMINASI PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN.....	22
4.1 Penerapan Strategi Komunikasi.....	22
4.2 Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi / Replikasi Aksi Perubahan.....	24
4.3 Keberlanjutan Aksi Perubahan	25
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB I

RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP)

1.1. LATAR BELAKANG

Diantara 7 Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2025 salah satu diantaranya adalah terwujudnya Kantor Layanan Modern dengan memberikan produk serta Layanan Pertanahan Dan Tata Ruang Secara Elektronik. Melalui visi Kementerian ATR/BPN tersebut terkandung misi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan layanan pertanahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Tuntutan perbaikan terhadap pelayanan publik tersebut mendorong Kementerian ATR/BPN untuk terus berbenah kearah yang lebih baik dan bertransformasi, utamanya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dimana pemanfaatan teknologi menjadi peran utama dalam memberikan kemudahan. Masyarakat sudah menuju bergerak ke era digital/elektronik hal ini dibuktikan dengan servis yang menunjang kegiatan sehari-hari sudah berbasis digital, servis untuk berbelanja kebutuhan pokok hingga sekunder/*eCommerce*, servis mendapatkan jasa transportasi, jasa pengantaran/*delivery*, layanan kesehatan hingga pembayaran transaksi pun menggunakan uang digital/elektronik, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang menjadi salah satu kunci Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik adalah pada kata mudah. Oleh karena itu perlu melakukan Langkah-langkah percepatan pematangan data pertanahan sebagai pondasi (*database*) dalam rangka pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik dengan cara mengembangkan ide-ide kreatif untuk membuat sebuah inovasi percepatan. Tujuannya supaya proses pelayanan administrasi pertanahan dapat dilakukan secara elektronik, *online*, *realtime*, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat atau sesuatu yang berkaitan dengan investasi. Hal ini harus menjadi perhatian untuk jajaran Kementerian ATR/BPN terutama kantor-kantor Pertanahan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan

publik.

1.2. Tujuan Aksi Perubahan

Adapun tujuan dari Rancangan Aksi Perubahan (RAP) ini yaitu:

- ❖ Jangka Pendek (selama 2 bulan kedepan) terlaksananya akselerasi LayananPengecekan Sertifikat;
- ❖ Jangka Menengah (selama 6 bulan setelah jangka pendek selesai) terlaksananya layanan Pengecekan Sertifikat yang berkualitas dan tidakmelewati SOP, serta berkurangnya intensitas
- ❖ Jangka Panjang (selama 2 tahun setelah jangka menengah selesai) terlaksananya Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertifikat yang berkualitas dan tidak melewati SOP, berkurangnya intensitas tunggakan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Pertanahan.

1.3. Manfaat Aksi Perubahan

Dengan pelaksanaan aksi Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Bagi *Team Leader*

Sebagai suatu tantangan dalam menerapkan kemampuan manajerial sebagai seorang pemimpin yang tangguh dalam menciptakan ide - ide kreatif melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan publik berbasis elektronik. Kemudian dapat menambah wawasanberpikir untuk melakukan perbaikan pelayanan pekerjaan dan peningkatan kemampuan serta penerapan karakter – karakter pemimpin yang melayani (*Servant Leadership*);

b. Bagi Unit Kerja / Organisasi

Meningkatnya kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik dan semakin siap untuk mewujudkan target tahun 2023 transformasi seluruh layanan pertanahan berbasis elektronik hal

akan mempermudah organisasi dalam memberikan pelayanan, melakukan kontrol, dan meningkatkan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan pertanahan;

c. Bagi Stakeholder

Kemudahan dalam mengakses Informasi dan Layanan pertanahan, Integrasi data dan *sharing* data. Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar dalam pelayanan publik digital, penyempurnaan sistem teknologi digital berkaitan dengan sistem pelayanan publik, mempersiapkan SDM yang kompeten dalam menjalankan sistem, serta menyusun berbagai birokrasi yang diatur oleh kebijakan- kebijakan terkait dalam mewujudkan *good governance* untuk layanan pertanahan berbasis elektronik serta layanan publik berbasis elektronik.

Pelayanan publik dilakukan dalam bentuk elektronik memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya implementasi *e-government* antara lain:

1. Memperbaiki layanan pemerintah;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas;
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumberpendapatan baru;
5. Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang cepat dan tepat menjawabpermasalahan;
6. Memberdayakan Masyarakat dan pihak – pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik.

1.4. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Ruang lingkup permasalahan yang diangkat menyangkut percepatan layanan pengecekan sertifikat yang secara peringkat masih sangat rendah, hal ini didukung dengan peringkat layanan pengecekan sertifikat yang masih berada pada peringkat 20 Sumatera utara dari 28 satuan kerja kantor pertanahan. Keterkaitan dengan cakupan bidang tugas adalah untuk meningkatkan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM), peranan kasubbagTU sebagai pejabat pengawas dalam hal ini adalah untuk memastikan tunggakan layanan berkurang atau bahkan zero tunggakan, adapun yang menjadi lokasi kelurahan yang menjadi aksi perubahan adalah: kelurahan asuhan, dimana dari sumber data KKP data Buku tanah valid dikelurahan tersebut sebanyak (86,45 %) dan surat ukur Valid adalah 93,86%.

1.5. Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah

Diagnosa Organisasi secara umum merupakan aktivitas atau upaya untuk memahami isu dan masalah yang ada dalam organisasi secara tepat termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan merumuskan solusinya. Permasalahan yang muncul dalam suatu organisasi dapat teridentifikasi dengan adanya diagnosa organisasi ini. Berdasarkan diagnosa penulis ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan, berdasarkan hasil diagnosa kemudian dianalisis dan mejadi isu strategis pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya Kualitas Pelayanan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar masih banyak terdapat permohonan yang penyelesaiannya melewati batas waktu SOP, sehingga untuk terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik dan efisien.
2. Dokumen Pertanahan yang belum tertata dengan baik dikarenakan Keterbatasan ruang penyimpanan dan sebahagian

Pencarian Buku Tanah yang masih manual hingga membutuhkan waktu yang lama. Dokumen/Arsip pertanahan adalah merupakan Asset Negara yang sangat penting yang dihasilkan dari kegiatan administrasi Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi lebih lanjut dokumen pertanahan itu sendiri wajib dipelihara oleh kantor pertanahan. Target Program Strategis Nasional PTSL semakin tahun semakin meningkat belum ditambah dengan dokumen/arsip yang dihasilkan dari kegiatan pemeliharaan data, oleh karena itu menyebabkan dokumen yang berada pada Kantor Pertanahan volumenya juga semakin meningkat, sehingga membutuhkan ruang arsip serta biaya pemeliharaan yang besar. Tentunya hal ini menjadi permasalahan yang cukup besar bagi tiap Kantor Pertanahan karena fungsi dan peran dokumen/arsip sangat diperlukan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan fungsi kegiatannya sebagai Alat Bukti Hukum (*The ability to produce evidence of action*) Arsip sebagai bukti atau legalitas. Dokumen/Arsip pertanahan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memiliki fungsi sebagai legalitas atau bukti-bukti kepemilikan tanah. Hal tersebut sangat penting untuk kenyamanan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah maupun kepada masyarakat. Perkembangan zaman yang sudah modern menuntut kantor pertanahan terus berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan digitalisasi dokumen pertanahan merupakan sebuah jawaban dalam menghadapi itu. Digitalisasi warkah berarti menjadikan dokumen warkah sebagai data digital dan meminimalisir penggunaan kertas (paperless).

3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum mumpuni Kurang dan Rendahnya kualitas SDM adalah salah satu isu strategis pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar,

Memiliki sumber daya manusia(SDM) berkompeten dan berdaya saing tinggi menjadi syarat mutlak untuk dapat meningkatkan Pelayanan Publik, Pengembangan kompetensi SDM menjadi sangat strategis dan harus segera dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari ketiga isu strategis diatas maka dalam menentukan priortias utama, diperlukan diagnosa isu organisasi untuk menentukannya, hal ini bertujuan untuk menemukan secara tepat permasalahan dalam organisasi/unit organisasi termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut serta merumuskan solusinya. Untuk menentukan isu strategis maka penulis menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, and Growth). Adapun Isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- ❖ Masih adanya permohonan yang penyelesaiannya melewati Batas waktu SOP sehingga menjadi tunggakan.

Rekap Layanan Prioritas										
No	Nama Kanwil	Persentase (%)						Kinerja	Rerata (%)	
		Pendaftaran SK	Peralihan	Perubahan Hak	Roya	Pengecekan	SKPT			Hak Tanggungan
1	Kab. Pakpak Bharat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79	0.00	4.83
2	Kab. Samosir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	11.43
3	Kota Padangsidimpuan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	5.36
4	Kota Sibolga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Kota Tanjung Balai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	3.86
6	Kab. Humbang Hasundutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	11.79
7	Kab. Toba Samosir	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	8.33	18.57
8	Kab. Tapanuli Selatan	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.35	10.42	17.69
9	Kota Tebing Tinggi	0.00	8.33	50.00	0.00	8.33	0.00	37.50	11.11	14.88
10	Kab. Tapanuli Tengah	0.00	0.00	0.00	33.33	52.63	0.00	80.00	14.33	23.71
11	Kab. Nias	100.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	80.00	27.78	35.24
12	Kab. Dairi	66.67	0.00	0.00	57.14	54.55	0.00	80.00	29.73	36.91
13	Kab. Simalungun	40.00	21.43	0.00	0.00	28.57	100.00	48.05	31.67	34.01
14	Kab. Padang Lawas	14.29	0.00	0.00	87.50	93.24	0.00	80.00	32.51	39.29
15	Kab. Labuhanbatu Selatan	0.00	71.43	0.00	50.00	75.00	0.00	80.00	32.74	39.49
16	Kab. Nias Selatan	90.00	50.00	0.00	66.67	0.00	0.00	80.00	34.45	40.95
17	Kab. Serdang Bedagai	50.00	65.71	0.00	41.67	60.00	0.00	80.00	36.23	42.48
18	Kab. Deli Serdang	63.74	45.37	4.76	30.77	52.07	25.00	81.05	36.95	43.25
19	Kab. Karo	90.91	4.35	0.00	100.00	33.33	0.00	38.82	38.10	38.20
20	Kab. Mandailing Natal	82.35	87.50	0.00	66.67	0.00	0.00	25.88	39.42	37.49
21	Kota Binjai	70.59	42.70	0.00	57.69	26.92	50.00	46.90	41.32	42.11
22	Kab. Langkat	75.00	11.24	0.00	50.00	29.63	84.62	39.29	41.75	41.40
23	Kab. Labuhan Batu	90.00	42.67	0.00	20.00	100.00	0.00	80.47	42.11	47.59
24	Kab. Asahan	84.62	5.26	31.25	100.00	42.50	0.00	32.20	43.94	42.26
25	Kota Pematang Siantar	0.00	30.19	42.86	50.00	54.55	100.00	80.00	46.27	51.09
26	Kota Medan	73.68	47.22	70.73	2.94	59.20	49.02	82.18	50.47	55.00
27	Kab. Tapanuli Utara	75.00	100.00	0.00	50.00	100.00	0.00	81.43	54.17	58.06
28	Kab. Batu Bara	100.00	50.00	16.67	85.71	48.00	95.00	80.00	65.90	67.91
	Total	45.69	24.41	7.72	33.93	35.19	17.99	61.28	27.49	32.37

Tabel 1. Layanan Prioritas Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar

1.5.1. Strategi Penyelesaian Masalah

Berdasarkan masalah utama yang telah diuraikan maka salah satu terobosan dalam mendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik adalah “Percepatan Layanan Prioritas Pengecekan Sertipikat Melalui Digitalisasi Buku Tanah dan Surat Ukur Pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar”.

Hal ini merupakan penyebab utama mengapa rendahnya kualitas pelayanan pertanahan khususnya pada layanan pengecekan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar. Dengan adanya percepatan dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Pertanahan melalui Digitalisasi Buku Tanah dan Surat Ukur .

Dengan Digitalisasi Buku tanah dan Surat Ukur ini maka akan memberi kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan publik terutama kepada pengguna layanan pertanahan sehingga tercapailah tujuan untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun tahapan dalam rancangan Aksi Perubahan “Percepatan Layanan Pertanahan Pengecekan Sertipikat Melalui Digitalisasi Buku Tanah dan Surat Ukur Pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar” adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Waktu	Output
1.	Jangka Pendek Tahapan Persiapan			
	a. Koordinasi Konsultasi dengan Mentor/Kepala Kantor	Tim Leader	24 Mei 2023	Dokumentasi
	b. Rapat Pembentukan Tim Kerja	Tim Leader	6 Mei 2023	Notulen
	c. Penerbitan SK Tim Kerja	Tim Leader	13 Mei 2023	SK Tim Kerja

	d. Rapat Tim Kerja untuk pelaksanaan kegiatan	Tim Leader	20 Mei 2023	SK Tim Kerja
	e. Koordinasi dan Sosialisasi antara Tim Pelaksana dengan <i>stakeholder</i>	Tim Leader	27 Mei 2023	Terlaksananya Penyuluhan kepada masyarakat dan PPAT
2.	Tahapan Implementasi Tim Kerja 1) Inventarisasi Sertipikat dan Buku Tanah yang belum terdigitalisasi 2) Pelaksanaan Kegiatan Digitalisasi Buku tanah dan Surat Ukur	Tim Leader Dan Tim Kerja	2 juni s.d 2 Juli 2023	Berkurangnya Tunggakan Pelayanan Pengecekan Sertifikat
3.	Tahapan Monitoring dan Evaluasi			
	a. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tim Leader	9 Juli s.d 16 Juli 2023	Dokumen
	b. Penyusunan Laporan Kegiatan	Tim Leader		Dokumen Laporan
	c. Seminar Laporan Aksi Perubahan	Tim Leader		Laporan Aksi Perubahan

Tabel 2. Rancangan Aksi Perubahan

1.5.2. Pemetaan Sikap Prilaku

PROFIL KOMPETENSI ASESMEN PEMETAAN PEGAWAI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NIP : 198803092009121004
NAMA : Ismail, S.E.
JABATAN : Kepala Subbagian Tata Usaha
UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi, menunjukkan bahwa nilai total kompetensi Subjek adalah 16 dari 18 nilai total kompetensi yang dipersyaratkan untuk Jabatan Pengawas (7 kompetensi memenuhi, dan 2 kompetensi belum memenuhi persyaratan), serta memiliki kesesuaian dengan persyaratan kompetensi pada jabatan yang sama sebesar 88.89 %. Dengan demikian, Subjek berada pada kategori **cukup optimal** untuk mengemban tugas pada Jabatan Pengawas.

Saran Pengembangan:

Diberikan penugasan menguraikan permasalahan kerja secara lebih terinci, salah satunya dengan mengikuti pelatihan Systematic Problem Solving ataupun Analytical Thinking

Jakarta, 22 Desember 2020

KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

Profil Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural



Nilai - Standar Kompetensi - Gap

Aspek Kompetensi	Nilai	Standar	Gap
Integritas	2	2	0
Kerja Sama	1	2	-1
Komunikasi	2	2	0
Orientasi pada Hasil	2	2	0
Pelayanan Publik	2	2	0
Pengembangan Diri dan Orang Lain	2	2	0
Mengelola Perubahan	2	2	0
Pengambilan Keputusan	1	2	-1
Perekat Bangsa	2	2	0

Total Nilai : 16, JPM : 88,89 %, Kategori : Cukup Optimal

Anda memiliki total 2 aspek dibawah standar yaitu pada aspek : Kerja Sama, Pengambilan Keputusan.

Uraian Potensi:

Subjek memiliki logika yang tergolong memadai untuk mengolah informasi berupa kalimat atau kata-kata, yang diperoleh saat mengolah data-data administratif atau ketika berdiskusi dengan berbagai kalangan. Selain mampu mempelajari konsep atau pola dari masalah, ia juga dapat mengembangkan argumentasi dan berdiplomasi dengan bahasa yang mudah dipahami lawan bicara. Di lain segi, ia perlu dibimbing saat harus mengidentifikasi sebab-akibat dari masalah berdasarkan pengamatan konkret terhadap tanda atau simbol, sehingga butuh waktu lebih lama saat mencari solusi untuk tugas-tugas teknis-praktis di lapangan. Ia juga belum mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya secara sistematis dan terstruktur. Meski demikian, ia memiliki inisiatif dan tergerak untuk mempersiapkan sendiri bahan-bahan yang diperlukan dalam penyelesaian tugas kerjanya. Saat diberikan penugasan dalam beban yang berat, ia juga cukup mampu menampilkan performa yang optimal dalam pengerjaan tugasnya. Kemampuan kepemimpinannya pun sudah terlihat cukup efektif karena Subjek mampu memberikan arahan dan membawa anggota kelompoknya untuk berkontribusi bersama dalam penyelesaian tugas. Subjek pun menunjukkan usaha yang konsisten dalam meraih target yang ditetapkan. Ia dapat menyelesaikan kewajibannya tanpa perlu arahan dan bimbingan secara terus-menerus dari orang lain. Saat berada dalam situasi sosial, ia juga mampu membuat suasana yang cukup hangat saat membangun relasi dengan orang lain. Subjek pun mampu menempatkan diri secara tepat sesuai dengan tuntutan lingkungan yang diharapkan. Ia juga dapat mengendalikan dan gejolak emosi yang dimiliki dan mengekspresikannya secara tepat saat berhadapan dengan situasi yang kurang menyenangkan.

KETERANGAN : 1 = Kurang Sekali; 2 = Kurang; 3 = Cukup; 4 = Baik; 5 = Baik Sekali

Gambar 1. Profil Kompetensi

PROFIL PSIKOLOGIS
ASESMEN PEMETAAN PEGAWAI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NIP : 198803092009121004
NAMA : Ismail, S.E.
JABATAN : Kepala Subbagian Tata Usaha
UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir

ASPEK PSIKOLOGIS		1	2	3	4	5
KEMAMPUAN BERPIKIR	1. Daya Analisa		x			
	2. Logika Berpikir			x		
SIKAP KERJA	3. Sistematika Kerja		x			
	4. Inisiatif			x		
	5. Daya Tahan Kerja			x		
	6. Kepemimpinan			x		
MOTIVASI	7. Dorongan Berprestasi			x		
	8. Tanggung Jawab			x		
KARAKTER	9. Keterampilan Interpersonal			x		
	10. Kepercayaan Diri			x		
	11. Stabilitas Emosi			x		

Gambar 2. Profil Psikologis

Dari hasil pemetaan kompetensi yang disajikan penulis masih memiliki gap nilai yang masih harus dipenuhi sebagai pejabat pengawas yaitu pada nilai Kerjasama dan pengambilan keputusan, setelah aksi perubahan ini dilaksanakan diharapkan terdapat peningkatan nilai pada Kerjasama dengan membuat rencana komunikasi kepada stakeholder terkait, sedangkan dalam pengambilan keputusan setelah dilaksanakannya aksi perubahan penulis dapat melihat pelatihan-pelatihan dari youtube, IG , FB dan mediasosial lainnya.

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

2.1 PEMBANGUNAN INTEGRITAS

Dalam Implementasi Aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Penulis sebagai peserta Akper, Penulis telah melaksanakan proses Implementasi aksi perubabahan yang berjudul Percepatan layanan prioritas pengecekan sertipikat melalui digitalisasi buku tanah dan surat ukur dilakukan dengan penuh integritas dimana hal ini selalu disampaikan oleh penulis sebagai peserta akper pada setiap kesempatan apel pagi kepada seluruh pegawai, sejalan dengan hal tersebut kantor pertanahan kota pematangsiantar juga telah mengajukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK wilayah bebas dari dari korupsi, penulis didalam 6 area perubahan berada di Penataan Manajemen SDM.



Gambar 3. Apel Pagi



kantahkotapematangsiantar



Gambar 4. Apel Pagi

2.2 PENGELOLAAN BUDAYA PELAYANAN (PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI)

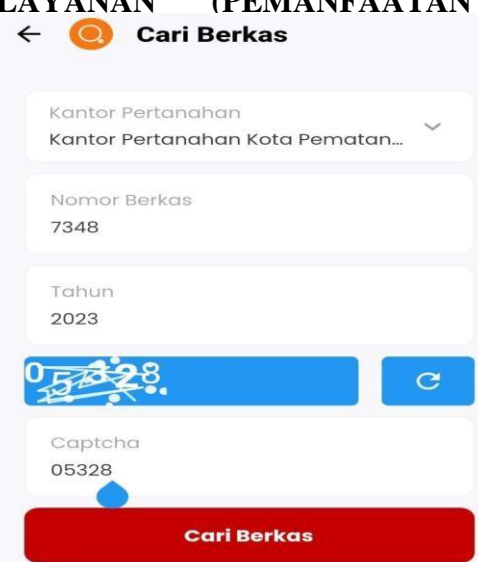
Dibuat 31 Juli 2023
Selesai

Posisi Terakhir Berkas
Tim Panitia

Para Pihak
SUWARNI YUSUF
Pemohon

Expedisi Berkas
31 Juli 2023
Loket Pelayanan Pendaftaran
Rominda

Kontak Kantor
Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar
JL DAHLIA NO.8
Email
atrbpnpematangsiantar@gmail.com
Telp
(0622)22504



Dalam hal pengelolaan budaya pelayanan di era digital, penulis sebagai peserta akper, dimana mementingkan prioritas pengecekan sertipikat melalui digunakannya expedisi berkas yang diunggulkan dengan pemanfaatan tehnologi informasi komputerisasi Kantor Pertanahan, dengan IPemohonan dapat mengecek perjalanan berkas

Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar
JL DAHLIA NO.8
☎ (0622)22504 ✉ atirbnpematangsiantar@gmail.com

Surat Perintah Setor
Nomor Berkas Permohonan : 7348/2023

Sesuai dengan permohonan saudara :

Nama Pemohon : SUWARNI YUSUF
Alamat : JL THAMRIN NO 116 C

Maka kepada Saudara diminta untuk segera membayar biaya pekerjaan dengan rincian sbb:

No	Uraian Pekerjaan	Bidang/Unit /Luas (m ²)	Biaya (Rp)
1	Pelayanan Pemeriksaan Tanah - Putusan Konstatasi	1	177.680
Jumlah :			177.680

Torbiang : # Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh #
Desa/Kelurahan : SUKADAME
Kecamatan : SIANTAR UTARA
Alias Hak : Hak Guna Bangunan No. 02.03.06.07.3.00118

Pematang Siantar, 31 Juli 2023
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
Kota Pematang Siantar
Perugas Loket

Romina Gurning A.Md
NIP : 19930725022042001

2023.037.348.164895798
0203-161695768

Pembayaran :

1. Agar segera dihevyar pada Loket yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diartarkan.
2. Pembayaran juga dapat dilakukan di ATM BANK dengan KODE PEMBAYARAN SIMFONI : 820230731958024 sebelum Tanggal 07/08/2023 Jam 08.43.37
3. Informasi, berita yang susun setelah paku berkas yang membantu kan penundaan akan diberitakukan via Email atau aplikasi 'Sentuh tananku'

←
7348

!
Berkas sedang berjalan dan belum melewati SOP.

Permohonan SK
Pembaruan Hak
Guna Bangunan
Perorangan

Sedang berjalan

Biaya IDR177.680,00

Petugas -

Dibuat 31 Juli 2023

Selesai -

Posisi Terakhir Berkas

Tim Panitia

Para Pihak

SUWARNI YUSUF
Pemohon

Gambar 5. Aplikasi Sentuh Tanahku

2.3 PENGELOLAAN TIM

Penulis dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan yang berjudul percepatan layanan prioritas pengecekan sertipikat melalui digitalisasi surat ukur dan buku tanah, selalu mengedepankan kerjasama dengan Tim terkait terutama seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dan Seksi Survei dan Pemetaan, dalam pengelolaan Tim tentu saja masih ada Hambatan kendala dan masalah yang dihadapi penulis, mengingat kegiatan dikantor pertanahan saat ini sangatlah padat, dari program strategis nasional seperti PTSL, Sertifikasi Aset Pemerintah, UKM, Pengadaan Tanah dll, tentu menguras pikiran tenaga dan SDM yang tersedia, tentu penulis dalam hal ini harus bijak dalam mensikapinya agar implementasi aksi perubahan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana.



Gambar 6. Rapat Tim (Rencana Aksi Perubahan)

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

3.1 CAPAIAN DAN BUKTI PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam Proses Implementasi Rencana Aksi Perubahan yang dibuat penulis berjudul percepatan layanan prioritas pengecekan sertipikat melalui digitalisasi surat ukur dan buku tanah, perlu penulis flas back kembali pada saat penulis mengambil tema ini, adapun alasan penulis mengangkat tema ini adalah berangkat dari rendahnya nilai 7 layanan prioritas di kantor pertanahan kota pematangsiantar, terutama dilayanan pengecekan sertipikat, namun pada saat paparan aksi perubahan, penulis mendapat masukan untuk tidak hanya berfokus di layanan pengecekan sertipikat saja, akan tetapi juga berfokus kepada seluruh 7 layanan prioritas, penulis coba tampilkan perbandingan Before after nya.

		Pendaftaran SK	Peralihan	Perubahan Hak	Roya	Pengecekan	SKPT	Hak Tanggungan	Kinerja	Akselerasi
1	Kab. Tapanuli Utara	69	97	100	97	99.15	100	93.8	93.71	67.76
2	Kab. Samosir	-	74	-	100	100	100	93.1	93.42	56.38
3	Kota Sibolga	-	100	-	91	77.14	-	93.3	90.36	43.91
4	Kab. Humbang Hasundutan	-	84	-	69	95.04	100	98.1	89.23	53.56
5	Kota Tanjung Balai	100	91	82	50	99.31	100	100	88.9	71.56
6	Kab. Nias	100	80	100	42	93.40	90	100	86.5	44.17
7	Kota Tebing Tinggi	50	80	69	76	98.85	100	97.9	81.68	44.76
8	Kab. Langkat	44	69	75	96	87.98	100	98.8	81.54	38.1
9	Kab. Karo	90	60	100	14	99.03	95.45	100	79.78	33.79
10	Kab. Simalungun	42	69	77	74	97.14	100	98.8	79.71	52.5
11	Kota Padangsidimpuan	57	59	-	75	87.37	92.31	95.5	77.7	44.54
12	Kab. Labuhan Batu	65	44	60	73	99.82	100	98.5	77.19	42.38
13	Kab. Tapanuli Selatan	96	92	20	27	100	100	100	76.43	51.41
14	Kota Medan	34	78	67	99	68.11	83.95	83.8	73.41	37.46
15	Kab. Tapanuli Tengah	37	86	25	69	87.22	100	95.9	71.45	38.13
16	Kota Pematangsiantar	19	79	88	28	81.46	100	95.6	70.15	37.2

Gambar 7. layanan Prioritas pada Awal Juni (BEFORE)

Penulis ingin paparkan bahwasanya hampir semua 7 layanan prioritas berwarna merah dengan total nilai kinerja **70,15**.

No	Nama Kantah	Jumlah Berkas	Kinerja (%)						Rerata (%)	
			Pendaftaran SK	Peralihan	Perubahan Hak	Roya	Pengecekan	SKPT	Hak Tanggungan	Kinerja
11	Kota Pematang Siantar	204	100	92.11	100	100	88.11	100	98	96.6
12	Kab. Toba Samosir	41	71.43	100	-	100	100	-	100	94.29
13	Kota Medan	672	76.92	99.4	88.24	100	86.13	84.82	98.4	91.86
14	Kota Binjai	94	100	93.33	100	100	94.87	50	100	91.17
15	Kota Sibolga	13	-	-	-	100	72.73	-	88.9	87.21
16	Kab. Tapanuli Utara	62	-	80	-	83.33	100	-	100	85.83
17	Kab. Mandailing Natal	23	25	100	-	100	100	-	100	85
18	Kab. Serdang Bedagai	86	80	66.67	100	75	92.21	100	100	84.84
19	Kab. Labuhanbatu Selatan	106	100	87.5	-	83.84	100	50	100	83.52
20	Kab. Labuhan Batu	124	88.89	85.82	20	81.67	82.86	100	100	82.78
21	Kab. Asahan	124	80	98.15	50	100	66.96	100	92.7	81.12
22	Kab. Tapanuli Tengah	31	14.29	100	100	100	58.82	-	100	78.85
23	Kab. Dairi	50	23.53	100	-	100	72.22	50	100	74.29
24	Kab. Deli Serdang	644	62.5	54.81	94	78.13	81.88	48.39	97.1	70.94
25	Kab. Simalungun	158	13.33	64.81	100	83.33	75.54	50	97.6	70.66
26	Kab. Batu Bara	71	40	80	100	40	85.71	66.67	100	70.34
27	Kab. Nias Selatan	11	0	50	-	-	93.75	-	100	80.94
28	Kab. Padang Lawas	42	0	85.71	-	42.86	27.59	100	100	58.36

Gambar 8. Layanan Prioritas pada tanggal 4 Agustus (After)

Terjadi Peningkat yang signifikan untuk kinerja 7 layanan prioritas dengan nilai kinerja **96, 6** dari **70, 15**.

3.2 MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Dengan terlaksananya implementasi aksi perubahan ini tentu berdampak terhadap pelayanan publik hal ini bias dilihat dari indek kepuasan masyarakat yang terjadi namun demikian lebih dari itu target jangka menengah dari implementasi aksi perubahan ini , memperbaiki citra layanan pertanahan terkhusus pada 7 layanan prioritas dimana 79% layanan kantor pertanahan berasal dari 7 layanan prioritas , sedangkan untuk jangka panjang dari implementasi aksi perubahan ini adalah

meningkat kepercayaan public terhadap layanan pertanahan yang semakin hari semakin cepat dan mudah. meningkat kepercayaan public terhadap layanan pertanahan yang semakin hari semakin cepat dan mudah.



Gambar 9. Survei IKM

KUALITAS PELAYANAN (IKM) 1 - 31 JULI 2023

No	Unit/ Satuan Kerja	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu	Responden
1	Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.49	4	99.93	Sangat Baik	A	485
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Simahungun	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.17	3.92	98.09	Sangat Baik	A	456
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.32	3.96	98.98	Sangat Baik	A	238
4	Kantor Pertanahan Kota Medan	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.25	3.94	98.58	Sangat Baik	A	172
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.46	3.76	94.06	Sangat Baik	A	144
6	Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	99.99	Sangat Baik	A	140
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.14	3.92	97.96	Sangat Baik	A	67
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Karo	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A	57
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.11	3.91	97.75	Sangat Baik	A	51
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A	44
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.47	3.99	99.84	Sangat Baik	A	42
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Nias	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.29	3.95	98.79	Sangat Baik	A	40
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.41	3.75	93.79	Sangat Baik	A	40
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.26	3.72	92.90	Sangat Baik	A	35
15	Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.34	3.96	99.09	Sangat Baik	A	33
16	Kantor Pertanahan Kota Binjai	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.33	3.73	93.33	Sangat Baik	A	26
17	Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17	3.89	97.14	Sangat Baik	A	21
18	Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.47	3.99	99.81	Sangat Baik	A	18
19	Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A	16
20	Kantor Pertanahan Kota Sibolga	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A	15
21	Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.15	3.92	98	Sangat Baik	A	15
22	Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A	12
23	Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A	8
24	Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.72	3.82	95.56	Sangat Baik	A	6
25	Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.84	3.85	96.25	Sangat Baik	A	4

Source : https://orpeg.atrbpn.go.id/survey/event_result_component
31/07/2023

Keterangan :

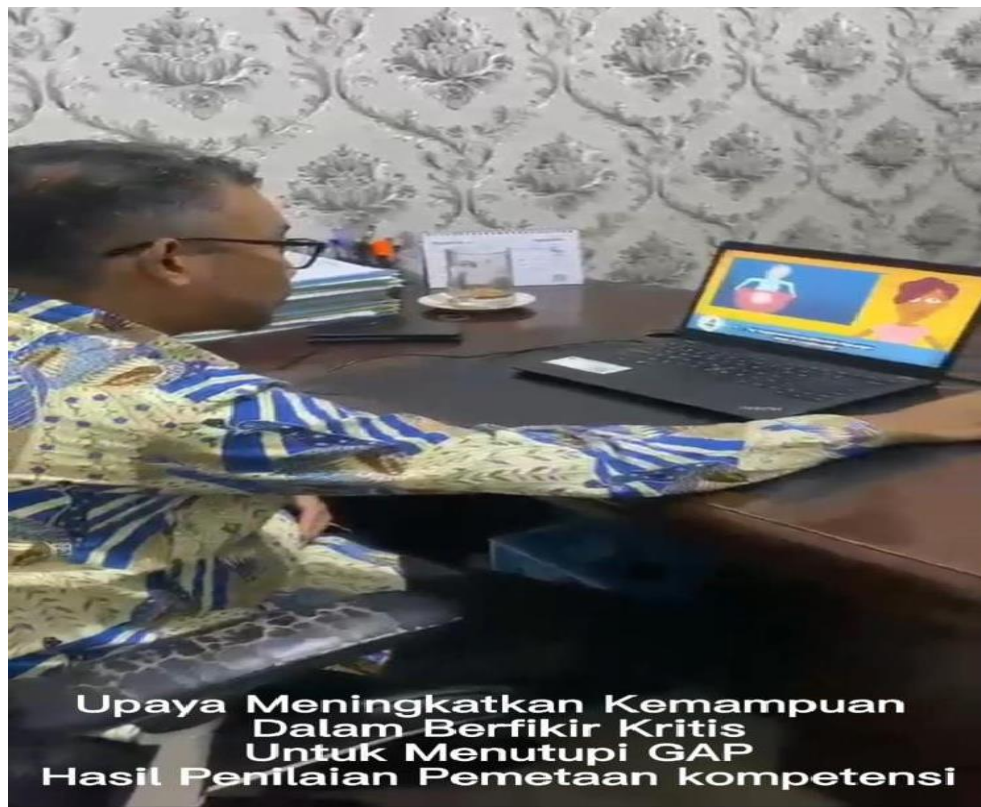

- =Sangat Baik
- =Baik
- =Kurang Baik
- =Tidak Baik
- =Belum Melakukan Survei (Juli 2023)

Gambar 10. Kualitas Pelayanan

Sebagaimana data terlampir terlihat bahwa indeks kepuasan masyarakat sangat baik dengan nilai indeks 4 dari 140 response.

3.3 Implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan

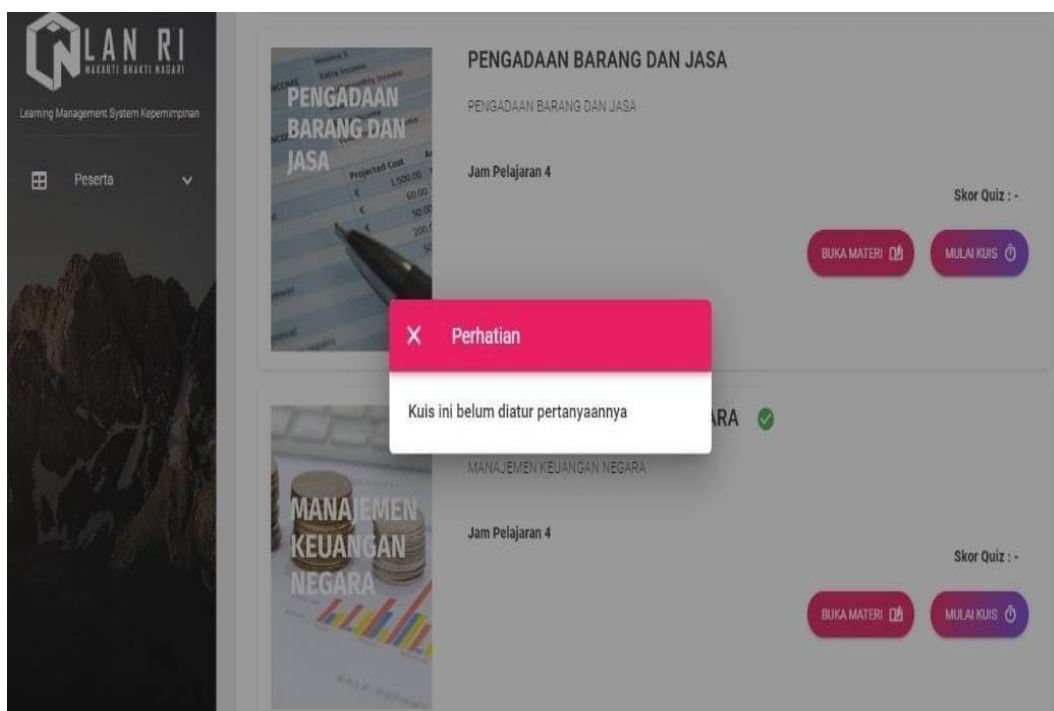
Dari hasil Pemetaan Kompetensi yang didapat, penulis masih memiliki gap yang harus di tingkatkan untuk diantaranya pengambilan keputusan dan kerjasama untuk itu penulis telah mendengarkan video yang berhubungan dengan critical thinking untuk menutupi gap yang terjadi.



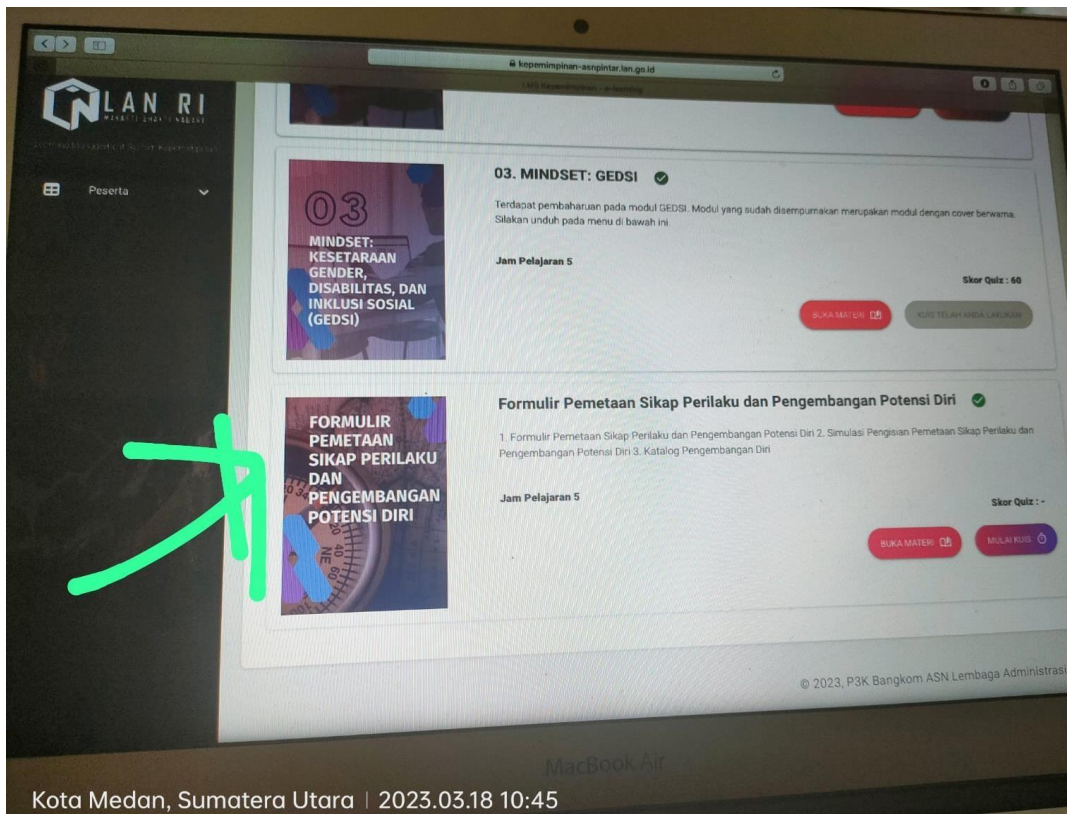
Gambar 11. Upaya Meningkatkan Kemampuan Dalam Berfikir Kritis

3.4 KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Mata Pelatihan pilihan yang diambil adalah manajemen keuangan Negara adapun hubungan antara implementasi aksi perubahan yang berjudul percepatan layanan prioritas pengecekan sertipikat melalui digitalisasi buku tanah dan surat ukur adalah pengakuan akuntansi yang berbasis akrual terhadap suatu layanan pertanahan menyebabkan munculnya pengakuan pendapatan diterima dimuka, apabila suatu layanan pertanahan telah dibayarkan oleh masyarakat ke kas Negara akan menimbulkan kewajiban yang harus diselesaikan Negara, misalkan 7 layanan prioritas untuk pengecekan sertipikat yang memiliki SOP 1 hari kerja, apabila tidak diselesaikan sampai melewati tahun anggaran berikutnya, hal ini akan menjadi kewajiban Negara dalam pencatatan akuntasinya.



Gambar 12. Menu Mata Pelatihan Pilihan



Gambar 13. Formulir Pemetaan Sikap Perilaku dan Pengembangan Potensi Diri

BAB IV

DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBELANJUTAN AKSI PERUBAHAN

4.1 PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI

Dalam Implementasi Aksi Perubahan ini penulis yang mengangkat tema Percepatan layanan Prioritas cek bersih melalui digitalisasi Surat Ukur dan Buku tanah juga menerapkan strategi komunikasi dengan memanfaatkan media komunikasi seperti WA dan Media sosial seperti istagram, dimana adapun tujuan dari Strategi Komunikasi tersebut adalah memudahkan Penulis dalam menyebarkan informasi kepada stakeholder terkait, Strategi komunikasi ini juga dibentuk melalui Surat keputusan kepala kantor Nomor : 88/KEP-12.72/VII/2023.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR: 88/KEP-12.72/VII/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA STRATEGI KOMUNIKASI
PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan strategi komunikasi terkait program/kegiatan Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar perlu dilakukan sosialisasi, publikasi, dan komunikasi yang tepat dan terpadu khususnya melalui media sosial;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor tentang Tim Pengelolaan Strategi Komunikasi di Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar.
- MENINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61);
 - 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
 - 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
 - 4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3570/4.3-IOOIXI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - 5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor B/HM.02/2176-100NW2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Surat Keputusan Penunjukan Tim Pengelola Strategi Komunikasi

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA STRATEGI KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Strategi Komunikasi di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar;
- KEDUA** : Tim Pengelola Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama memiliki tugas mengelola strategi komunikasi di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar.
- KETIGA** : Tim Pengelola Strategi Komunikasi, terdiri dari:
1. Penanggung Jawab
 2. Ketua
 3. Anggota
 4. Administrator Pengelola (Admin)
- KEEMPAT** : Seluruh unsur Tim Pengelola Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Penanggungjawab
 - a. Melakukan pembinaan dan pengelolaan strategi komunikasi;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur;
 - c. Melaporkan secara periodic kepada Sekretaris Jenderal tentang pengelolaan strategi komunikasi.
 2. Ketua
 - a. Memimpin penatalaksanaan pengelolaan strategi komunikasi, mulai dari Analisis, Perencanaan, Produksi/Pelaksanaan, Pelaporan hingga Evaluasi;
 - b. Memberikan dukungan administrasi, sarana/prasarana dan anggaran pengelolaan strategi komunikasi;
 - c. Mengarsipkan hasil strategi komunikasi.
 3. Anggota
 - a. Menindaklanjuti strategi komunikasi pada unit kerja masing-masing;
 - b. Berkoordinasi dengan anggota lain untuk merumuskan strategi komunikasi;
 - c. Menyampaikan laporan pengelolaan strategi komunikasi kepada ketua secara periodic mingguan dan bulanan.
 4. Admin Pengelola
 - a. Me-repost seluruh basil postingan sosial media Kementerian ATR/BPN;

-3-

- e. Menjaga kerahasiaan username dan password media sosial Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar;
- f. Berkoordinasi dengan media massa/wartawan daerah dalam rangka sosialisasi kebijakan dan program pertanahan melalui konferensi pers/doorstop/mengirimkan artikel/rilis;
- g. Melakukan dan Menyusun laporan monitoring pemberitaan media massa terkait.

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pematang Siantar
 Pada Tanggal : 27 Juli 2023

 KANTOR PERTANAHAN
 KOTA PEMATANG SIANTAR

SAH LUBIS, S.H
 NIP. 196710181993031001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar
 NOMOR : 88/KEP-12.72/VII/2023
 TANGGAL : 27 Juli 2023

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Imansyah Lubis, S.H. 196710181993031001	Kepala Kantor	Penanggungjawab
2.	Ismail, S.E. 198803092009121004	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua
3.	Leony Diosantry Sirait, S.E 198908062014022004	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	Anggota
4.	Rominda Gurning, A.Md 199307252022042001	Pengelola Informasi Pertanahan	Anggota
5.	Idham Yusuf Emri, S.Sos Ahli Pertama – Penata Pertanahan	Ahli Pertama – Penata Pertanahan	Anggota
6.	Nicko Gunawan	Asisten Pengadministrasi umum	Anggota
7.	Thahrina Lailiani Siregar, S.Kom	Operator Komputer	Anggota
8.	Desra Siallagan, SE	Operator Komputer	Anggota

Ditetapkan di : Pematang Siantar
 Pada tanggal : 27 Juli 2023



KANTOR PERTANAHAN
 KOTA PEMATANGSIANTAR
 IMANSYAH LUBIS, S.H
 NIP. 196710181993031001

Gambar 14. SK Kepala Kantor

4.2 KEBERHASILAN MENDAPAT DUKUNGAN ADOPSI/REPLIKASI AKSI PERUBAHAN

Dalam Implementasi aksi perubahan ini penulis juga mendapat dukungan dari kepala kantor dan testimony dari Kepala seksi penetapan Hak dan pendaftaran. Secara langsung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh penulis berdampak terhadap 7 layanan prioritas yang notabene adalah kegiatan yang merupakan tuisi dari seksi penetapan dan pendaftaran hak.



Gambar 15. Testimoni KASI Hak dan Pendaftaran

4.3 KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Keberlanjutan dari aksi perubahan ini tentu mendapat dukungan penuh dari mentor, terlebih aksi perubahan ini secara langsung bersentuhan dengan 7 Layanan Prioritas yang menjadi pusat perhatian pimpinan di tingkat kementerian, mengingat 79 % dari layanan pertanahan berdasar di 7 layanan prioritas hal ini dibuktikan dengan dari proses Rancangan aksi perubahan ini dibuat telah disetujui oleh mentor penulis



LEMBAR PERSETUJUAN

Rancangan Aksi Perubahan dengan judul:

Percepatan Layanan Prioritas Pertanahan Pengecekan Sertipikat Melalui Digitalisasi Buku Tanah Dan Surat Ukur Pada Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 Gelombang 1 Angkatan II,

Nama : Ismail, S.E.
 NIP : 198803092009121004
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Rancangan Aksi Perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, Untuk selanjutnya diimplementasikan pada saat *off class* mulai tanggal 24 Mei 2023.

Menyetujui:

Bogor, 22 Mei 2023
COACH



Akhmad Misbakhul Munir, S.T., M.Sc.
NIP. 198603242009121004

Pematang Siantar, 21 Mei 2023
MENTOR



Imansyah Lubis, S.H.
NIP. 196710181993031001

Gambar 16. Persetujuan Mentor

Adapun kegiatan jangka pendek dari implementasi aksi perubahan yang penulis adalah untuk mempercepat dan mempermudah layanan pertanahan pada kantor pertanahan kota pematangsiantar sedangkan target jangka menengah dari implementasi aksi perubahan ini , memperbaiki citra layanan pertanahan terkhusus

pada 7 layanan prioritas dimana 79% layanan kantor pertanahan berasal dari 7 layanan prioritas sedangkan untuk jangka panjang dari implementasi aksi perubahan ini adalah meningkat kepercayaan public terhadap layanan pertanahan yang semakin hari semakin cepat dan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.instagram.com/kantahkotapematangsiantar>, diakses tanggal 03 Agustus 2023

<https://kepemimpinan-asnpintar.lan.go.id/backend/participant>, diakses tanggal 03 Agustus 2023

https://orpeg.atrbpn.go.id/survey/event_result_component, diakses tanggal 03 Agustus 2023

<https://sipk.atrbpn.go.id/pengembangan/katalog>, diakses tanggal 03 Agustus 2023

<https://statistik.atrbpn.go.id/>, diakses tanggal 03 Agustus 2023

<https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw>, diakses tanggal 03 Agustus 2023